



Koperasi Desa Merah Putih dalam Pembangunan Berkelanjutan Berkbasis *Sustainable Livelihood Approach*

Iman Irawansyah¹⁾, Atem²⁾

Universitas Palangka Raya, Indonesia

imanira@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bukit Tunggal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan penghidupan masyarakat berbasis *Sustainable Livelihood Approach* (SLA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood Approach* yang mencakup lima modal aset, yaitu modal manusia, modal alam, modal ekonomi, modal sosial, dan modal fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal alam merupakan aset dominan yang menopang penghidupan masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, hortikultura, dan tanaman aren. Modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan kepemimpinan lokal memperkuat legitimasi kelembagaan koperasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Modal fisik berupa infrastruktur, gudang, kios pupuk, dan layanan digital mendukung operasional koperasi, sedangkan modal manusia masih menghadapi keterbatasan kapasitas adaptif akibat minimnya pelatihan dan pendampingan. Di antara seluruh aset, modal ekonomi menjadi faktor pembatas utama karena belum optimalnya realisasi dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga kapasitas kelembagaan koperasi dalam memperluas layanan usaha, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berkembang secara maksimal. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset penghidupan, tetapi juga oleh efektivitas *transforming structures and processes* berupa kebijakan pemerintah dan kapasitas kelembagaan koperasi dalam mentransformasikan aset tersebut menjadi strategi penghidupan yang produktif. Oleh karena itu, sinkronisasi antara dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan koperasi, dan optimalisasi lima modal aset menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Koperasi Desa Merah Putih; Sustainable Livelihood Approach; Kapasitas Kelembagaan; Pembangunan Berkelanjutan; Penghidupan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Red and White Village Cooperative (Koperasi Desa Merah Putih/KDMP) of Bukit Tunggal in supporting sustainable development through strengthening community livelihoods based on the Sustainable Livelihood Approach (SLA). The research employed a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews with cooperative managers, community leaders, customary leaders, and local residents, and analyzed thematically using the Sustainable Livelihood Approach framework, which comprises five livelihood assets: human, natural, financial, social, and physical capital. The findings reveal that natural capital is the primary asset supporting local livelihoods through agriculture, livestock farming, horticulture, and sugar palm cultivation. Social capital, reflected in trust, mutual cooperation, and local leadership, strengthens the cooperative's institutional legitimacy and enhances community participation. Physical capital, including infrastructure, warehouses, agricultural input stores, and



digital financial services, supports cooperative operations, while human capital remains constrained by limited adaptive capacity due to insufficient training and continuous assistance. Among the five livelihood assets, financial capital represents the principal constraint because the anticipated financial support from the central government has not been fully realized, thereby limiting the cooperative's institutional capacity to expand business services, productive financing, and community economic empowerment. The study concludes that sustainable livelihoods depend not only on the availability of livelihood assets but also on the effectiveness of transforming structures and processes, particularly government policies and cooperative institutional capacity, in transforming these assets into productive livelihood strategies. Therefore, synchronizing government support, strengthening cooperative institutions, and optimizing the five livelihood assets are essential prerequisites for achieving inclusive and sustainable rural economic development.

Keywords: *Red And White Village Cooperative; Sustainable Livelihood Approach; Institutional Capacity; Sustainable Development; Community Livelihoods.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang secara konstitusional ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Melalui prinsip demokrasi ekonomi, Koperasi tidak hanya diarahkan sebagai badan usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga yang memperkuat pemerataan akses terhadap sumber daya, modal, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif internasional, koperasi dipandang sebagai institusi ekonomi yang memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional karena mengedepankan kepemilikan bersama, partisipasi anggota, dan orientasi kesejahteraan jangka panjang (Birchall, 2018). Selain itu, (Bateman, 2017) menegaskan bahwa sistem keuangan berbasis koperasi hanya dapat berkembang apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan akses terhadap pembiayaan jangka panjang, sehingga koperasi mampu melakukan investasi produktif, memperkuat kapasitas organisasi, dan menciptakan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selanjutnya disebut KDMP sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa. Program tersebut menargetkan pembentukan sekitar 70.000–80.000 koperasi desa sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, hilirisasi produk desa, pengembangan usaha produktif, serta peningkatan ketahanan pangan nasional (Farid, 2025). Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 juga menempatkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari percepatan pembangunan desa menuju kemandirian ekonomi. Penelitian (Subakti & Partiah, 2025) menunjukkan bahwa pembentukan koperasi desa melibatkan berbagai aktor kelembagaan, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses pembentukan kelembagaan koperasi. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme pembentukan koperasi daripada kapasitas koperasi menjalankan fungsi ekonomi setelah terbentuk.

Secara normatif pemerintah merancang koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi desa, namun implementasinya koperasi menghadapi berbagai persoalan. KDMP Kelurahan Bukit Tunggal merupakan KDMP pertama di Kota Palangka Raya dan baru diresmikan pada bulan juli 2025. KDMP ini kemudian dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti keterbatasan modal awal, lambatnya realisasi pembiayaan, belum tersedianya skema pembiayaan operasional yang memadai, serta tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan KDMP Bukit Tunggal mengalami kesulitan membangun tata kelola kelembagaan yang sehat, mengembangkan unit usaha produktif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, maupun memperluas pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, KDMP Bukit Tunggal berpotensi hanya menjadi lembaga administratif yang telah terbentuk secara formal, tetapi belum mampu menjalankan fungsi ekonomi secara optimal.

Permasalahan keterbatasan akses modal tersebut berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola KDMP Bukit Tunggal. Tata kelola yang baik tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan koperasi menyediakan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung operasional, pelayanan anggota, inovasi usaha, dan keberlanjutan organisasi. (Birchall, 2018) menjelaskan bahwa daya tahan koperasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggota dan lembaga memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan yang stabil sehingga koperasi mampu mempertahankan aktivitas ekonomi pada saat menghadapi tekanan eksternal. Sebaliknya, (Bateman, 2017) menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan akan menghambat investasi produktif koperasi sehingga lembaga hanya bergerak pada aktivitas ekonomi berskala kecil dengan kontribusi pembangunan yang relatif terbatas. Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi bukan semata-mata keberadaan KDMP, melainkan kemampuan KDMP mengakses sumber pembiayaan yang memungkinkan tata kelola organisasi berkembang secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji koperasi dari beragam perspektif. (Nasution, Hidayati, Nasution, & Hasyim, 2024) menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual sehingga belum mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan koperasi gagal berkembang pada tingkat implementasi. (Wulandari & Alam, 2020) menunjukkan bahwa koperasi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan akses usaha dan pembiayaan, tetapi penelitian tersebut berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum mengkaji persoalan kelembagaan dan keterbatasan akses modal koperasi secara mendalam. Sementara itu, (Subakti & Partiah, 2025) menyoroti pentingnya peran BPD dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, tetapi kajian tersebut berhenti pada tahap pembentukan kelembagaan tanpa mengevaluasi bagaimana koperasi mempertahankan operasionalnya setelah terbentuk, terutama ketika dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya tersedia. (Farid, 2025) mengkaji Program Koperasi Merah Putih melalui perspektif analisis wacana media dan menemukan bahwa pemberitaan media lebih banyak membangun narasi optimisme pembangunan desa dibandingkan mengulas tantangan implementasi di lapangan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada fungsi koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, proses pembentukan kelembagaan, maupun representasi kebijakan pemerintah. Penelitian terdahulu belum secara khusus menjelaskan hubungan antara keterbatasan akses pembiayaan dari pemerintah pusat dengan kemampuan koperasi membangun tata kelola organisasi yang efektif. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang menghubungkan persoalan pembiayaan koperasi dengan perubahan strategi penghidupan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan desa. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana keterbatasan akses modal pemerintah mempengaruhi tata kelola KDMP serta dampaknya terhadap kapasitas koperasi dalam mendukung penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada KDMP Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, sebagai studi kasus untuk menganalisis bagaimana keterbatasan akses modal dari pemerintah pusat mempengaruhi tata kelola koperasi dan kemampuan koperasi menjalankan fungsi ekonomi bagi masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pembentukan koperasi atau peran kelembagaan, tetapi menelaah keterkaitan antara dukungan pembiayaan pemerintah, tata kelola organisasi koperasi, serta kapasitas koperasi dalam memperkuat penghidupan masyarakat.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan *Sustainable Livelihood Framework* yang dikembangkan oleh Chambers dan Conway. Kerangka ini memandang keberlanjutan penghidupan masyarakat ditentukan oleh kemampuan rumah tangga mengakses lima aset penghidupan, yaitu modal finansial, modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal alam, yang dipengaruhi oleh kebijakan, kelembagaan, serta struktur pemerintahan (Serrat, 2017). Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan akses modal pemerintah pusat dipahami sebagai

hambatan terhadap penguatan modal finansial koperasi yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan koperasi membangun tata kelola kelembagaan, memperluas pelayanan ekonomi, dan memperkuat strategi penghidupan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka *Sustainable Livelihood*, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara dukungan kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan koperasi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat secara lebih komprehensif sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi penguatan kebijakan pengembangan KDMP di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan di KDMP Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan pada Bulan Oktober 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami secara mendalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, dinamika struktural yang memengaruhi kesejahteraan lokal, serta menelaah bagaimana koperasi berperan sebagai instrumen ekonomi inklusif. Karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu keterbatasan modal, akses layanan dasar, peran sosial masyarakat, hingga transformasi sosial akibat keberadaan koperasi, menuntut penelusuran fenomena secara komprehensif dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis kausal melalui pengendalian variabel, melainkan untuk mengeksplorasi realitas empiris melalui data lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan termasuk, pengurus koperasi sebanyak 2 orang, masyarakat sekitar 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh adat 1 orang. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi masyarakat sebelum dan sesudah hadirnya koperasi. Data wawancara ini menjadi landasan utama dalam memetakan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Selain wawancara, studi literatur digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis peran KDMP dalam pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi deskriptif yang merefleksikan kondisi empiris di lapangan. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis koperasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber data yang memiliki perspektif berbeda terhadap fenomena yang sama untuk memperoleh konsistensi informasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda sehingga dapat diketahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya bukan hanya sekedar persepsi sementara. Sedangkan Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama untuk meningkatkan kedalaman dan ketepatan interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi Merah Putih dalam *Sustainable Livelihood Approach*

Sustainable Livelihood Approach (SLA) menempatkan lima modal aset, modal manusia, modal alam, modal ekonomi, modal sosial, dan modal fisik sebagai faktor utama yang memengaruhi kapasitas kelembagaan KDMP. Analisis disusun berdasarkan transkrip wawancara yang telah dilakukan kepada pengurus KDMP Bukit Tunggal (Alten), tokoh masyarakat (Wilbert), Tokoh Adat (Lion) dan masyarakat (Kevin), dengan penekanan pada hubungan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan koperasi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

a. *Modal Manusia (Human Capital)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal manusia di sekitar KDMP Bukit Tunggal

sebenarnya telah terbentuk melalui pengalaman panjang. Pengalaman tersebut merupakan bentuk *experiential knowledge* yang menjadi modal penting dalam mempertahankan mata pencaharian berbasis sumber daya alam. Akan tetapi, kapasitas tersebut masih bersifat tradisional dan belum berkembang menjadi kemampuan adaptif yang mampu menjawab perubahan pasar, perkembangan teknologi, maupun tuntutan pengelolaan usaha yang lebih modern. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya inovasi usaha masyarakat, rendahnya diversifikasi produk, serta minimnya kemampuan pengelolaan bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Dengan kata lain, pengetahuan teknis yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya berkembang menjadi kapasitas kewirausahaan yang mendukung penguatan kelembagaan koperasi.

Keterbatasan modal manusia juga dipengaruhi oleh struktur demografi masyarakat yang masih didominasi kelompok usia dewasa dan lanjut usia, sehingga proses regenerasi pelaku usaha berlangsung relatif lambat. Di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam aktivitas ekonomi koperasi mulai terlihat, namun belum disertai program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koperasi masih berada pada tahap awal dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa KDMP Bukit Tunggal telah berupaya memperkuat modal manusia melalui pelibatan perempuan dan pemuda dalam kegiatan koperasi serta penyelenggaraan pelatihan dasar mengenai pengelolaan usaha. Namun, intensitas pelatihan tersebut masih sangat terbatas sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan belum signifikan. Pendampingan yang bersifat insidental belum mampu menghasilkan proses pembelajaran yang berkelanjutan, sementara pengembangan modal manusia memerlukan investasi yang konsisten melalui pendidikan, pelatihan teknis, pendampingan usaha, serta penguatan kemampuan manajerial anggota koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan koperasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal finansial, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola organisasi.

Peningkatan modal manusia memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas kelembagaan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Semakin tinggi kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi anggota koperasi, semakin besar pula kemampuan koperasi dalam mengembangkan inovasi usaha, memperluas jaringan pemasaran, mengelola risiko, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Sebaliknya, apabila penguatan modal manusia tidak menjadi prioritas, maka potensi sumber daya alam, modal sosial, maupun dukungan kebijakan pemerintah tidak akan mampu ditransformasikan secara optimal menjadi strategi penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkesinambungan, pendidikan kewirausahaan, pendampingan teknis, dan regenerasi kepemimpinan menjadi kebutuhan strategis bagi KDMP Bukit Tunggal agar mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi ekonomi lokal yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Modal Alam (*Nature Capital*)

Modal alam (*natural capital*) dipahami sebagai seluruh sumber daya alam yang menjadi basis utama masyarakat dalam membangun strategi penghidupan, meliputi lahan, air, hutan, keanekaragaman hayati, serta berbagai jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Modal alam tidak hanya dipandang sebagai aset produksi, tetapi juga sebagai fondasi yang memungkinkan masyarakat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi kapasitas sumber daya tersebut bagi generasi mendatang (Serrat, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan strategi penghidupan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam mengelola modal alam secara produktif sekaligus berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal alam merupakan aset yang paling dominan dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar KDMP Bukit Tunggal. Struktur ekonomi lokal masih bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, budidaya

sayuran, tanaman aren, buah-buahan hortikultura, serta tanaman pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat sangat bergantung pada kualitas dan produktivitas sumber daya alam yang tersedia. Dominasi sektor agraris ini mencerminkan bahwa masyarakat menjadikan modal alam sebagai titik awal dalam membangun strategi penghidupan, sedangkan aset lainnya seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal ekonomi berfungsi sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya tersebut (Ghazali, 2023). Dengan demikian, keberlangsungan kelembagaan KDMP Bukit Tunggal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan modal alam yang menjadi basis ekonomi anggotanya.

Potensi sumber daya alam tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan unit usaha koperasi, seperti penyediaan pupuk, benih, pestisida, serta distribusi sarana produksi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi usaha koperasi telah menyesuaikan karakteristik aset penghidupan lokal, sehingga keberadaan koperasi tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang menghubungkan pemanfaatan modal alam dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Strategi kelembagaan semacam ini menunjukkan bahwa pemanfaatan modal alam harus didukung oleh kelembagaan yang mampu memfasilitasi akses masyarakat terhadap input produksi, pasar, dan inovasi agar aset alam dapat ditransformasikan menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Ghazali, 2023).

Upaya masyarakat mengembangkan tanaman aren dan komoditas lokal sebagai alternatif terhadap ekspansi perkebunan sawit. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengarahkan strategi penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekologi lahan gambut. Pilihan strategi ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Chambers dan Conway menekankan bahwa penghidupan dikatakan berkelanjutan apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus mempertahankan kapasitas sumber daya alam untuk masa depan (Serrat, 2017). Dengan demikian, pemanfaatan tanaman aren dan komoditas lokal memiliki nilai strategis karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung konservasi lingkungan serta mengurangi tekanan terhadap ekosistem gambut.

Keberadaan modal alam belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan karena tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang memadai. Hubungan antara aset penghidupan dengan *policies and institutions* sangat menentukan kemampuan masyarakat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, KDMP Bukit Tunggal memiliki posisi strategis sebagai kelembagaan lokal yang dapat mentransformasikan potensi modal alam menjadi strategi penghidupan yang lebih produktif melalui penyediaan sarana produksi, penguatan jaringan pemasaran, serta pengembangan usaha berbasis komoditas lokal. Dengan kata lain, keberlanjutan penghidupan masyarakat tidak hanya bergantung pada melimpahnya sumber daya alam, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan koperasi dalam mengelola dan menghubungkan modal alam dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* yang menempatkan modal alam sebagai fondasi utama penghidupan, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan kebijakan, kelembagaan, dan strategi penghidupan yang dibangun oleh masyarakat.

c. Modal Ekonomi (*Finacial Capital*)

Modal ekonomi (*financial capital*) merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan modal manusia, modal alam, modal fisik, dan modal sosial menjadi strategi penghidupan yang produktif. (Serrat, 2017) menjelaskan bahwa modal ekonomi mencakup tabungan, akses terhadap kredit, pinjaman, pendapatan, dan berbagai sumber pembiayaan yang memungkinkan rumah tangga maupun kelembagaan melakukan investasi, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Namun demikian, modal ekonomi juga merupakan aset yang paling sulit diakses oleh

masyarakat pedesaan, sehingga keterbatasan modal sering kali menjadi penyebab utama rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengembangkan penghidupannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KDMP Bukit Tunggul Kelurahan Bukit Tunggul telah memperoleh dukungan dari pemerintah melalui legalitas kelembagaan, kemudahan administrasi, serta komitmen pemberian bantuan permodalan, realisasi dukungan finansial belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, kapasitas kelembagaan koperasi masih bertumpu pada modal internal yang berasal dari simpanan anggota, dana pribadi pengurus, serta dukungan operasional yang sangat terbatas dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi kebijakan di tingkat operasional. Kebijakan dan kelembagaan (*policies and institutions*) seharusnya menjadi faktor transformasi yang membuka akses masyarakat terhadap aset penghidupan, khususnya modal ekonomi (Saputri, Subandriyo, & Hardiyan, 2025). Akan tetapi, ketika aliran modal dari pemerintah pusat belum terealisasi, maka fungsi transformasi tersebut tidak berjalan secara optimal sehingga koperasi belum memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menjalankan seluruh mandat ekonominya.

Keterbatasan aliran modal tersebut kemudian menjadi hambatan utama (*bottleneck*) dalam penguatan kelembagaan KDMP Bukit Tunggul. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada terbatasnya kemampuan koperasi memperbesar modal usaha, tetapi juga mengurangi kapasitas organisasi dalam memperluas unit bisnis, meningkatkan stok barang kebutuhan pokok, mengembangkan layanan simpan pinjam, menyediakan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku UMKM, serta membangun kemitraan usaha yang lebih luas. Padahal, mayoritas masyarakat masih menghadapi persoalan utama berupa keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Akibatnya, koperasi belum mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal sebagai lembaga yang menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan sumber-sumber modal formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya modal ekonomi koperasi secara langsung menurunkan kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan ekonomi kepada anggota.

Lebih lanjut, keterlambatan pencairan dana pemerintah pusat juga menimbulkan efek berantai (*multiplier effect*) terhadap pemanfaatan empat modal aset lainnya. Potensi modal alam yang melimpah tidak dapat diolah secara optimal karena keterbatasan pembiayaan untuk sarana produksi, pengadaan pupuk, maupun pembelian produk masyarakat. Modal manusia berupa keterampilan dan pengalaman masyarakat juga belum berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif akibat terbatasnya akses terhadap pembiayaan usaha. Demikian pula modal sosial yang ditandai dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi belum mampu dikapitalisasi menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah karena kapasitas finansial kelembagaan masih rendah. Oleh sebab itu, penguatan modal ekonomi melalui percepatan realisasi dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kapasitas kelembagaan KDMP Bukit Tunggul. Dengan tersedianya modal yang memadai, koperasi akan mampu mengintegrasikan seluruh aset penghidupan masyarakat menjadi strategi ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan ekonomi berbasis koperasi dapat diwujudkan secara lebih efektif.

d. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial (*social capital*) tidak hanya dipahami sebagai keberadaan jaringan sosial, tetapi juga mencakup hubungan saling percaya (*trust*), norma bersama, kepemimpinan lokal, mekanisme partisipasi, serta kemampuan masyarakat untuk bertindak secara kolektif dalam mencapai tujuan bersama. (Serrat, 2017) menegaskan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan, hubungan kepercayaan, kelompok formal maupun informal, kepemimpinan, nilai-nilai bersama, serta mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber daya dan

memperkuat efektivitas kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal finansial, tetapi juga oleh kualitas modal sosial yang dimiliki masyarakat sebagai fondasi pembentukan kelembagaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar KDMP Kelurahan Bukit Tunggal memiliki modal sosial yang relatif kuat, yang tercermin dari masih terpeliharanya budaya gotong royong, tingginya solidaritas sosial, serta hubungan yang harmonis antar warga. Budaya kolektif tersebut menjadi faktor penting yang mempercepat proses pembentukan dan penerimaan koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas koperasi, mulai dari musyawarah, pemanfaatan layanan usaha, hingga partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi berkembang bukan semata-mata karena adanya kebutuhan ekonomi, melainkan karena didukung oleh hubungan sosial yang telah terbangun sebelumnya. Kepercayaan sosial tersebut merupakan aset yang mampu menurunkan biaya transaksi, memperkuat koordinasi antar anggota, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan kolektif.

Modal sosial masyarakat juga diperkuat oleh keberadaan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi tinggi di tengah masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mensosialisasikan tujuan KDMP, menjembatani komunikasi antara pengurus dengan masyarakat, serta membangun keyakinan bahwa koperasi merupakan lembaga yang bekerja untuk kepentingan bersama. Peran kepemimpinan lokal tersebut memperlihatkan bahwa proses pelebagaan KDMP Bukit Tunggal berlangsung melalui pendekatan sosial yang berbasis kepercayaan, bukan melalui pendekatan administratif semata. Kepemimpinan lokal merupakan bagian integral dari modal sosial karena mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai struktur dan proses kelembagaan (*policies and institutions*) yang menentukan akses terhadap berbagai aset penghidupan.

Lebih lanjut, kuatnya modal sosial terbukti mampu menopang keberlangsungan kelembagaan koperasi meskipun koperasi masih menghadapi keterbatasan modal ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan KDMP lebih banyak dibangun melalui kepercayaan masyarakat dibandingkan melalui kekuatan finansial. Kepercayaan tersebut menjadi modal awal yang memungkinkan KDMP tetap memperoleh dukungan masyarakat, mempertahankan partisipasi anggota, serta mengembangkan berbagai unit usaha secara bertahap. Dengan demikian, modal sosial berfungsi sebagai *institutional capital* yang memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi dalam mengorganisasi sumber daya lokal dan menjaga keberlanjutan organisasi pada fase awal pengembangannya. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan, partisipasi, dan solidaritas masyarakat, semakin besar pula kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Modal sosial tidak hanya menjadi aset penghidupan masyarakat, tetapi juga merupakan faktor determinan yang membentuk legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kelembagaan KDMP Bukit Tunggal sebagai institusi ekonomi berbasis komunitas.

e. Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal fisik (*physical capital*) merupakan aset yang mencakup infrastruktur dasar, seperti sarana produksi, fasilitas pelayanan publik, serta teknologi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih efektif. Modal fisik tidak hanya meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pasar, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola berbagai aktivitas ekonomi secara berkelanjutan (Prayuda & Riofita, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi modal fisik di wilayah KDMP Bukit Tunggal relatif mendukung pengembangan kelembagaan koperasi. Perbaikan infrastruktur jalan, kedekatan wilayah dengan pusat kota, serta tersedianya sekolah, puskesmas, jaringan

internet, layanan BRILink, sistem pembayaran digital QRIS, gudang penyimpanan, gerai sembako, dan kios pupuk telah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan ekonomi dan memperlancar mobilitas barang maupun jasa. Infrastruktur tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian, tetapi juga memperkuat kapasitas operasional koperasi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada anggota. Ketersediaan gudang memungkinkan KDMP Bukit Tunggal menjaga stok barang secara lebih baik, sedangkan dukungan teknologi digital seperti QRIS dan BRILink meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperluas inklusi keuangan Masyarakat (Saputri et al., 2025).

Namun demikian, keberadaan modal fisik belum secara otomatis menghasilkan kelembagaan koperasi yang kuat apabila tidak diikuti dengan dukungan modal ekonomi yang memadai. Infrastruktur yang tersedia hanya akan memberikan manfaat optimal apabila koperasi memiliki modal kerja yang cukup untuk menjaga kesinambungan pasokan barang, memperluas unit usaha, dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa modal fisik berfungsi sebagai *enabling asset* yang memperkuat kapasitas kelembagaan KDMP Bukit Tunggal, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan koperasi mengintegrasikan infrastruktur tersebut dengan dukungan pembiayaan, tata kelola kelembagaan, dan sistem distribusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, modal fisik menjadi faktor penting yang meningkatkan daya saing kelembagaan koperasi, namun kontribusinya terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat baru akan optimal apabila bersinergi dengan penguatan modal ekonomi, modal sosial, dan kebijakan pemerintah yang konsisten.

2. Koperasi Merah Putih dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam kerangka *Sustainable Livelihood Approach* (SLA), keberlanjutan penghidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan lima aset penghidupan (*livelihood assets*), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh *transforming structures and processes*, yaitu kebijakan, kelembagaan, regulasi, dan tata kelola yang menentukan bagaimana masyarakat memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut. (Serrat, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dan kelembagaan berfungsi sebagai mekanisme transformasi yang menghubungkan berbagai modal aset menjadi strategi penghidupan yang mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas suatu kelembagaan lokal, termasuk Koperasi Merah Putih, sangat bergantung pada konsistensi dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap pembentukan KDMP Bukit Tunggal, antara lain melalui percepatan legalitas kelembagaan, sosialisasi program, fasilitasi perizinan, monitoring dan evaluasi, pembinaan kelembagaan, kemudahan akses terhadap distributor komoditas, serta penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga keuangan. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan KDMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Intervensi kebijakan tersebut berfungsi meningkatkan kapasitas kelembagaan agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik, dan modal ekonomi yang dimiliki masyarakat. Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat kesenjangan antara dukungan regulatif dengan realisasi dukungan finansial yang dibutuhkan koperasi (Prayuda & Riofita, 2026).

Belum optimalnya aliran pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi faktor yang paling menentukan terbatasnya kapasitas kelembagaan KDMP. Meskipun koperasi telah memiliki legalitas, struktur organisasi, dukungan sosial masyarakat, dan peluang usaha yang cukup besar, keterbatasan modal kerja menyebabkan berbagai fungsi kelembagaan belum dapat dijalankan secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan

koperasi dalam memperluas unit usaha, meningkatkan kapasitas layanan simpan pinjam, menyediakan stok barang dalam jumlah memadai, membeli hasil pertanian masyarakat secara berkelanjutan, maupun mengembangkan program pemberdayaan ekonomi anggota. Akibatnya, KDMP Bukit Tunggal hanya berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi distribusi kebutuhan masyarakat daripada sebagai lembaga ekonomi yang mampu menggerakkan transformasi ekonomi lokal secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh aspek organisasi dan tata kelola, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya finansial yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi-fungsi ekonominya secara efektif (Saputri et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, hubungan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan koperasi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat membentuk suatu hubungan yang saling bergantung dan bersifat kausal. Kebijakan pemerintah merupakan faktor awal yang menentukan terbentuknya kelembagaan koperasi melalui penyediaan regulasi, legitimasi hukum, pembinaan, dan dukungan sumber daya (Wagiati & Fitrianto, 2013). Selanjutnya, kapasitas kelembagaan koperasi menentukan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai modal aset masyarakat menjadi strategi penghidupan yang produktif melalui penyediaan akses permodalan, distribusi sarana produksi, penguatan jaringan pemasaran, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Apabila kapasitas kelembagaan tersebut berkembang secara optimal, maka masyarakat akan memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi sehingga produktivitas, pendapatan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga dapat meningkat secara berkelanjutan.

Sebaliknya, apabila dukungan kebijakan hanya berhenti pada aspek administratif tanpa diikuti realisasi pendanaan yang memadai, maka kapasitas kelembagaan koperasi akan tetap terbatas sehingga pemanfaatan modal manusia, modal alam, modal sosial, dan modal fisik yang dimiliki masyarakat tidak dapat dioptimalkan. Dengan demikian, keberhasilan KDMP Bukit Tunggal dalam pembangunan ekonomi desa sangat ditentukan oleh 3 komponen yaitu sinkronisasi antara dukungan kebijakan pemerintah, penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan optimalisasi aset penghidupan masyarakat. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu rantai transformasi yang saling menguatkan, di mana kebijakan pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi, kapasitas kelembagaan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya ekonomi, dan pada akhirnya mendorong terwujudnya penghidupan yang lebih inklusif, tangguh, serta berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bukit Tunggal memiliki potensi strategis sebagai kelembagaan ekonomi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan penghidupan masyarakat berbasis *Sustainable Livelihood Approach* (SLA). Keberadaan koperasi didukung oleh modal alam yang melimpah, modal sosial yang kuat, modal fisik yang relatif memadai, serta modal manusia yang telah memiliki pengalaman pada sektor agraris. Namun, efektivitas pemanfaatan seluruh aset penghidupan tersebut belum optimal karena masih lemahnya modal ekonomi, terutama akibat belum terealisasinya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas kelembagaan koperasi masih terbatas dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, temuan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan penghidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan lima modal aset (*livelihood assets*), tetapi juga oleh efektivitas *transforming structures and processes* berupa kebijakan pemerintah dan kapasitas kelembagaan koperasi dalam mentransformasikan aset tersebut menjadi strategi penghidupan yang produktif. Dalam konteks KDMP Bukit Tunggal, hubungan antara dukungan kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan koperasi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat bersifat kausal dan saling memperkuat. Semakin konsisten dukungan kebijakan, khususnya dalam realisasi

pembiayaan dan penguatan kelembagaan, semakin besar kapasitas koperasi dalam mengintegrasikan modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik, dan modal ekonomi menjadi akses permodalan, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, serta penciptaan peluang ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah pusat perlu mempercepat realisasi dukungan permodalan yang telah direncanakan melalui mekanisme penyaluran yang jelas, tepat waktu, dan disertai sistem monitoring serta evaluasi berkala agar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki kapasitas finansial untuk mengembangkan layanan simpan pinjam, memperluas unit usaha, menyerap hasil pertanian masyarakat, dan memperkuat permodalan pelaku UMKM. Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu menyelenggarakan program pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan, meliputi pelatihan manajemen koperasi, kewirausahaan, digitalisasi usaha, pengolahan komoditas lokal, serta regenerasi kepemimpinan dengan melibatkan pemuda dan perempuan sebagai bagian dari strategi penguatan modal manusia.

Bagi KDMP Bukit Tunggal, diperlukan penyusunan rencana bisnis berbasis potensi lokal dengan memprioritaskan pengembangan rantai nilai komoditas pertanian, hortikultura, peternakan, dan tanaman aren melalui kemitraan dengan pelaku usaha, BUMN, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Koperasi juga perlu mengoptimalkan modal sosial yang telah dimiliki dengan meningkatkan partisipasi anggota melalui pertemuan rutin, transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan jejaring pemasaran berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bateman, M. (2017). Financial cooperatives for sustainable local economic and social development. *Food Chain*, 18(1), 37–49. <https://doi.org/10.3362/0957-1329.2007.006>
- Birchall, J. (2018). The potential of co-operatives during the current recession; theorizing comparative advantage. *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.5947/jeod.2013.001>
- Farid, A. S. (2025). WACANA KRITIS MEDIA ONLINE TERHADAP KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI PROYEK EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 57–75.
- Ghazali, M. (2023). PENERAPAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DI PULAU KECIL TERLUAR, STUDI KASUS: PULAU MARATUA. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 97. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12055>
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim. (2024). PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(2), 522–530. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>
- Prayuda, M., & Riofita, H. (2026). Peran Koperasi Merah Putih Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Vokasi Raflesia*, 6(1), 107–114. <https://doi.org/10.53494/jpvr.v6i1.1359>
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Serrat, O. (2017). Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance. In Asian Development Bank (Ed.), *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance* (1st ed.). Mandaluyong, Philipines: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9>
- Subakti, T., & Partiah, S. (2025). PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)



DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT. *Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–13. Retrieved from <https://ejournal.arshmedia.org/index.php/collaborative>

Wulandari, R. D., & Alam, H. N. (2020). Penerapan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–122. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32502/sa.v2i2.3162>.